

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Stewardship

Menurut teori stewardship manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson & Davis, 1991). Teori stewardship dapat menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward selalu bertindak sesuai kepentingan pemilik dimana manajer akan bertindak untuk kepentingan bersama. Ketika kepentingan pemilik sumber daya dengan steward berbeda, steward akan berusaha menjalin kerjasama dengan pemilik ketimbang untuk menentang kepentingan pemilik, karena bagi steward kepentingan bersama merupakan hal yang lebih baik karena usaha untuk mencapai tujuan organisasi adalah yang terpenting. Jadi, dapat dikatakan bahwa kepuasan pemilik adalah kesuksesan organisasi, namun demikian perlu diingat bahwa steward juga memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup (Raharjo, 2007).

Teori ini sejalan dengan hubungan antara pemerintah sebagai steward yang mengelola sumber daya dan masyarakat sebagai pemilik, dimana pemerintah sebagai steward memiliki tugas memberikan pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakat. Tugas melayani

masyarakat ini sejalan dengan keinginan bersama yaitu kepentingan masyarakat. Selain dengan memberikan pelayanan publik yang baik pemerintah daerah juga diwajibkan untuk membuat sebuah laporan keuangan yang jujur sesuai dengan kejadian transaksi yang sebenarnya (Putro, 2013).

2. Teori Kompetensi Spencer

Penelitian ini menggunakan teori kompetensi spencer untuk menjelaskan tentang kompetensi sumber daya manusia. Secara sederhana kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap. Dijelaskan dalam bukunya yang berjudul *competence at work*, kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang yang berkaitan dengan efektivitas kinerja dan dapat digunakan untuk menilai kinerja seseorang. Kompetensi juga dapat dipakai untuk mengukur kinerja seseorang dengan kriteria tertentu. Ada lima karakteristik kompetensi yang disebutkan oleh Spencer dan Spencer (1993), yaitu, *motives* (suatu hal yang membuat seseorang secara konsisten melakukan tindakan tertentu), *traits* (sifat seseorang dalam merespon situasi tertentu), *self concept* (sikap seseorang), *knowledge* (pengetahuan dibidang tertentu), dan *skills* (kemampuan yang dimiliki pada bidang tertentu).

Disebutkan pula bahwa dimasa depan pengelolaan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan berbasis kompetensi. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan adanya tindakan responsif untuk meningkatkan kinerja

organisasi. Pengembangan kompetensi dapat berupa upaya pengembangan pengetahuan dan sumber daya manusia. Perubahan lingkungan organisasi yang terjadi, menuntut individu mampu menjawab tantangan tersebut dengan menunjukkan kinerjanya (Moehariono, 2009).

3. Teori COSO

Diterbitkannya *Internal Control–Integrated Framework* pada tahun 1994 oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) yang menyatakan bahwa pengendalian internal adalah pengendalian aktivitas perusahaan yang dilakukan pimpinan agar tercapainya tujuan secara efisien, yang terdiri dari kebijakan dan prosedur (COSO, 2013). COSO menyebutkan, terdapat 5 komponen pengendalian internal yang harus diterapkan untuk memberikan jaminan tercapainya tujuan pengendalian internal, yaitu:

- a. Lingkungan pengendalian adalah seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melakukan pengendalian internal di seluruh organisasi.
- b. Penilaian risiko dilakukan karena ada anggapan bahwa akan selalu ada kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak buruk terhadap pencapaian tujuan organisasi yang melalui proses dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menilai risiko
- c. Aktivitas pengendalian adalah tindakan yang dilakukan melalui kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan

manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan.

- d. Informasi dan komunikasi diperlukan bagi entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal untuk mendukung tercapainya tujuannya. Manajemen membutuhkan informasi yang relevan dan berkualitas baik dari sumber internal maupun eksternal untuk mendukung berfungsinya pendamping pengendalian internal lainnya. Komunikasi adalah proses penyampaian, berbagi, dan memperoleh informasi yang terus-menerus berulang.
- e. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah masing-masing komponen pengendalian internal telah dilaksanakan dan berfungsi maka dilakukan evaluasi. Terdapat tiga jenis evaluasi yang dapat dilakukan yaitu evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan kombinasi dari keduanya.

Teori COSO dapat menjelaskan tentang efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah. Kelima komponen diatas juga dijadikan komponen tercapainya efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah di Indonesia dengan beberapa penyesuaian. Di Indonesia sendiri sistem pengendalian internal untuk organisasi pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah diawasi langsung oleh inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

4. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dipakai dalam jangka waktu tertentu. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi kalau diubah kedalam konteks yang memberikan makna (Lillrank, 2003). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010, menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran menyajikan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Sekurang-kurangnya laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, serta sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi komparatif dengan periode sebelumnya, terdiri dari saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan tahun sebelumnya, dan saldo anggaran lebih akhir.

c. Neraca

Neraca menyajikan informasi posisi keuangan yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dalam periode tertentu.

d. Laporan Operasional

Menyajikan informasi mengenai kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pos-pos pendapatan, beban, surplus/defisit operasi, kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit laporan operasional.

e. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menjadi alat pertanggungjawaban kas masuk dan kas keluar terdiri dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris dalam satu periode pelaporan.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas sekurangkurangnya menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit laporan operasional periode berjalan, dan koreksi yang menambah/mengurang secara langsung.

g. Catatan atas laporan keuangan

Berisi rincian atas pos-pos yang ada pada laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial yang tidak dapat terpisahkan.

5. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran normatif yang harus diwujudkan sehingga dapat memenuhi tujuan dari laporan keuangan yang dibuat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010

tentang standar akuntansi pemerintah disebutkan bahwa terdapat empat karakteristik sebagai prasyarat terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas, yaitu:

a. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan jika mampu mempengaruhi keputusan pemakai, dan mampu memprediksi masa depan serta mampu mengevaluasi kejadian masa lalu menggunakan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Informasi yang relevan adalah:

- 1) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)
- 2) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
- 3) Tepat waktu
- 4) Lengkap

b. Andal

Andal artinya bahwa laporan keuangan jauh dari informasi yang bebas dari kesalahan dan disusun secara jujur agar tidak menyesatkan pemakai. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- 1) Penyajian jujur
- 2) Dapat diverifikasi
- 3) Netralitas

c. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan yang disajikan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada periode yang sama. Perbandingan dapat dilakukan jika dari tahun ke tahun entitas

menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dan laporan keuangan dapat dibandingkan dengan entitas lain jika menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

d. Dapat dipahami

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakainya dan menggunakan istilah yang sesuai.

6. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam segala hal, begitu pula di bidang akuntansi pemerintah daerah. Sumber daya manusia merupakan subjek yang menentukan akan dibawa kemanakah suatu organisasi karena pihak yang akan menjalankan dan membuat segala macam standar serta aturan adalah sumber daya manusia tersebut. Baik atau buruknya organisasi dapat dikatakan tergantung pada sumber daya manusianya. Sumber daya manusia adalah aset yang dimiliki organisasi yang dapat dikembangkan dan dilatih agar dapat membawa organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapainya.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan individu yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Saat ini sumber daya manusia bukan lagi sebagai *human resource* saja, namun lebih dari itu bahwa sumber daya manusia merupakan *human capital*. Dimana sumber daya manusia tidak lagi diibaratkan menjadi sebuah aset yang hanya dapat

dimanfaatkan namun sumber daya manusia merupakan modal yang dapat dikembangkan melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan agar memiliki kompetensi tertentu. Kompetensi sumber daya manusia merupakan segala bentuk keahlian, pengetahuan, dan pemahaman yang dimiliki oleh seorang individu. Dalam hal ini, adalah kompetensi untuk dapat mengolah dan menyajikan data ke dalam sebuah laporan keuangan. Kemampuan perusahaan untuk memperoleh kompetensi tergantung pada kondisi historis yang unik. Ketika perusahaan berevolusi, mereka mengambil keahlian, kemampuan, dan sumberdaya yang unik bagi mereka, mencerminkan jalan setapak yang dilalui dalam sejarah (Barney, 1995)

7. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi adalah rangkaian komponen yang saling berhubungan, diantaranya adalah orang-orang, prosedur-prosedur, dan peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengubah data secara manual maupun terkomputerisasi menjadi sebuah informasi yang selanjutnya akan dapat didistribusikan kepada berbagai pihak untuk membuat keputusan. (Romney & Steinbart, 2006). Pada organisasi pemerintah daerah sistem informasi akuntansi yang diterapkan salah satunya adalah berupa Sistem Informasi Keuangan Daerah. Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, bahwa Sistem keuangan daerah yang selanjutnya disebut SIKD adalah

Suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya

menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah

Kurniawan (2014) menyatakan bahwa tujuan penyusunan sistem informasi akuntansi sektor publik adalah untuk:

- a. Menyediakan informasi bagi pengambil kebijakan.
- b. Memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun struktur informasi.
- c. Memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern.
- d. Mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi

8. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem pengendalian intern bukan hal baru dalam pemerintahan.

Petrovits *et al.* (2011) menyatakan:

Internal control is broadly defined as the process put in place by management to provide reasonable assurance regarding the achievement of effective and efficient operations, reliable financial reporting, and compliance with laws and regulations.

SPI merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Di Indonesia sendiri ketentuan mengenai sistem pengendalian internal untuk pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai dalam rangka tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern pemerintah harus diterapkan sepenuhnya dalam penyelenggaraan pemerintah. Sistem pengendalian intern pemerintah tidak hanya mengatur perihal keuangan namun, sistem pengendalian intern pemerintah juga mengatur perihal non keuangan. Untuk menyelenggarakan pengelolaan pemerintah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel maka diperlukan sebuah sistem untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan pemerintahan baik dalam bidang keuangan maupun non keuangan. Disinilah pentingnya sistem pengendalian intern pemerintah untuk diterapkan dalam pemerintahan. Sistem pengendalian intern pemerintah dapat mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) baik yang disengaja maupun tidak disengaja, karena dalam sistem pengendalian intern pemerintah memuat berbagai peraturan, termasuk pula peraturan dalam menyajikan laporan keuangan, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan sistem informasi.

Sama halnya dengan apa yang disebutkan COSO (2013) bahwa terdapat lima komponen agar terciptanya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal, dalam Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 tentang Sistem pengendalian intern pemerintah juga disebutkan bahwa terdapat lima unsur dalam sistem pengendalian intern pemerintah, yaitu:

a. Lingkungan pengendalian

Pimpinan instansi harus menciptakan lingkungan pengendalian yang positif dan kondusif agar sistem pengendalian internal dapat diterapkan melalui:

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
- 2) Komitmen terhadap kompetensi;
- 3) Kepemimpinan yang kondusif
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, dan
- 8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

b. Penilaian risiko

Penilaian risiko wajib dilakukan oleh pimpinan, yang terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko dengan cara menetapkan tujuan instansi.

c. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian dilakukan untuk mengatasi risiko dan penetapan pelaksanaan kebijakan. Kegiatan pengendalian ini dapat berupa pembinaan sumber daya manusia, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi

dan kejadian, pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, serta akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.

d. Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi harus dilakukan untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan segala bentuk informasi kepada seluruh pegawai. Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan minimal harus memanfaatkan berbagai bentuk sarana komunikasi dan mengelola, mengembangkan, serta memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

e. Pemantauan

Pemantauan terhadap sistem pengendalian internal wajib dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta *review* lainnya.

B. Penurunan Hipotesis dan Penelitian Terdahulu

1. Pengaruh Kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas sistem pengendalian internal

Sistem pengendalian internal berperan untuk menyelenggarakan pengelolaan pemerintah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam teori COSO terdapat lima komponen agar terciptanya efektivitas sistem pengendalian internal. Jika kelima komponen ini dapat terpenuhi dapat dikatakan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal akan

tercipta. Salah satu dari kelima komponen itu adalah terciptanya lingkungan pengendalian yang positif dan kondusif. Menciptakan lingkungan pengendalian yang positif dan kondusif ini dapat diterapkan melalui merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan sumber daya yang berkompeten. Kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia dapat mendukung efektivitas sistem pengendalian internal karena kompetensi sumber daya manusia yang berupa keahlian, pengetahuan, dan sikap yang dimiliki dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Peneliti menduga bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki aparat maka akan membuat penerapan sistem pengendalian intern pemerintah lebih efektif. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Syarifudin (2014) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap sistem pengendalian internal pemerintah, sehingga peneliti mengajukan hipotesis:

H₁ : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem pengendalian internal

2. Pengaruh Pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal

Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang terintegrasi untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan data yang diubah menjadi informasi dan bermanfaat untuk pemakai internal agar dapat digunakan dalam pengendalian ataupun

pembuatan keputusan. Sistem informasi akuntansi digunakan untuk mendapatkan informasi akurat secara efektif dan efisien yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk menerapkan sistem pengendalian internal karena salah satu manfaat sistem informasi akuntansi adalah untuk memperbaiki pengendalian akuntansi.

Selain lingkungan pengendalian, salah satu komponen sistem pengendalian internal yang disebutkan dalam teori COSO adalah informasi dan komunikasi yang dapat dipenuhi oleh sistem informasi akuntansi. Jika sistem informasi akuntansi telah digunakan dan dimanfaatkan dengan efektif, akan mempermudah dan mempercepat untuk mendapatkan dan mengolah data yang dibutuhkan sehingga aparat dapat melakukan tugasnya sesuai dengan sistem pengendalian internal sehingga sistem pengendalian internal dapat diterapkan secara efektif. Untuk dapat menerapkan sistem pengendalian internal secara efektif dibutuhkan sistem dan informasi yang memadai agar aktivitas dalam pemerintah berjalan dengan cepat, mudah, dan tepat sesuai yang diharapkan (Magribi, 2015).

Menurut peneliti, sistem informasi akuntansi dimanfaatkan oleh pemerintah daerah agar Sistem Pengendalian Internal dapat diterapkan secara efektif. Pada penelitian Marzuki (2012) menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh sangat kuat terhadap efektifitas sistem informasi akuntansi. Hal senada juga ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Magribi (2015) pada PT. Arta Boga tentang pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas sistem pengendalian

internal yang menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem pengendalian internal.

Peneliti mengajukan hipotesis:

H₂ : Pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem pengendalian internal

3. Pengaruh Sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan

Dari hasil audit yang telah dilakukan oleh BPK masih menunjukkan banyaknya penyimpangan yang terjadi pada pelaporan keuangan. Telah disampaikan oleh BPK, bahwa penyimpangan ini salah satunya disebabkan karena lemahnya sistem pengendalian internal pada pemerintah daerah karena penilaian kualitas laporan keuangan tidak hanya dinilai dari kesesuaian dengan SAP tetapi juga dinilai dari kesesuaiannya dengan sistem pengendalian intern pemerintah (Kompas, 2011).

Menurut teori COSO, sistem pengendalian internal merupakan pengendalian aktivitas perusahaan yang dilakukan pimpinan agar tercapainya tujuan secara efisien, yang terdiri dari kebijakan dan prosedur. Adanya penerapan sistem pengendalian internal yang baik maka organisasi akan berjalan dengan baik termasuk dalam prosedur penyajian laporan keuangannya. Sistem pengendalian internal yang diterapkan dengan baik juga akan menghasilkan keluaran berupa laporan keuangan yang berkualitas. Artinya salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas

laporan keuangan adalah efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah.

Peneliti berargumen bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian Nurillah dan Muid (2014), Mahaputra dan Putra (2014), Yosefrinaldi (2013), dan Syarifudin (2014) tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini sejalan dengan dugaan peneliti. Hipotesis yang diajukan adalah:

H₃ :Efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

4. Pengaruh Kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan

Perubahan aturan yang terjadi dalam tata cara penyajian laporan keuangan daerah di Indonesia, yaitu dari basis kas menjadi basis akrual membuat kemampuan dari aparatur pengelola laporan keuangan semakin dibutuhkan. Kompetensi sumber daya manusia yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur pemerintah yang baik seharusnya dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Dimana dengan bekal ilmu dari pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dimiliki dapat diterapkan untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, dibutuhkan

sumber daya manusia untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan SAP.

Peneliti menduga bahwa kompetensi sumber daya manusia dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia pada pemerintah daerah akan cenderung menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini karena sumber daya manusia yang berkompeten artinya melalui kompetensi yang dimiliki dapat memahami dan mengimplementasikan berbagai aturan dan standar penyusunan laporan keuangan yang berkualitas (Nurillah dan Muid, 2014).

Hal senada diungkapkan dalam penelitian Nurillah dan Muid (2014), Ihsanti (2014), dan Yosefrinaldi (2013) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga peneliti merumuskan hipotesis keempat:

H₄ : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

5. Pengaruh Pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan

Seperti apa yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa sistem informasi akuntansi adalah rangkaian komponen yang saling berhubungan, diantaranya adalah orang-orang, prosedur-prosedur, dan peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengubah data secara manual maupun terkomputerisasi menjadi sebuah informasi andal yang

selanjutnya akan dapat didistribusikan kepada berbagai pihak untuk membuat keputusan. (Romney & Steinbart, 2006).

Salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah andal, yaitu bebas dari kesalahan dan menyesatkan. Berbagai data transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah pasti sangatlah kompleks. Oleh karena itu dibutuhkan sistem informasi akuntansi sebagai sistem dan teknologi yang terintegrasi dan handal untuk mencatat dan memproses berbagai data transaksi yang terjadi. Sistem informasi akuntansi dapat dimanfaatkan untuk meminimalisir berbagai kesalahan pencatatan dan pengolahan data ini karena pengelolaan keuangan tercatat lebih sistematis dan akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dimanfaatkannya sistem informasi akuntansi secara efektif, maka akan mendukung terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini karena sistem informasi akuntansi dapat menyampaikan informasi secara cepat dan akurat, dimana hal tersebut sangat dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas (Andini & Yusrawati, 2015)

Penelitian Nurillah dan Muid (2014), Andini dan Yusrawati (2015), dan Yosefrinaldi (2013) membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan positif antara sistem informasi akuntansi dengan kualitas laporan keuangan, sehingga hipotesis kelima:

H₅ : Pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

6. Pengaruh Kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan yang dimediasi oleh efektivitas sistem pengendalian internal

- a. Pengaruh Kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan yang dimediasi oleh efektivitas sistem pengendalian internal

Kompetensi sumber daya manusia yang baik saja tidak cukup untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga diperlukanlah sistem pengendalian internal untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengelola sumber daya organisasi berupa kompetensi sumber daya manusia agar dapat meminimalisir terjadinya kecurangan (Syarifudin, 2014). Hal ini karena kompetensi sumber daya manusia saja tidak cukup untuk meminimalisir terjadinya kesalahan penyajian laporan keuangan, sehingga diperlukan sistem pengendalian internal untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas yang tidak hanya diukur melalui kesesuaian dengan SAP saja tapi juga kesesuaian terhadap sistem pengendalian internal yang diterapkan (Kompas, 2011).

Penelitian Syarifudin (2014) menyatakan sistem pengendalian internal dapat memediasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Peneliti

menduga bahwa dengan adanya kompetensi sumber daya manusia yang baik dengan efektivitas penerapan sistem pengendalian internal maka kesalahan pencatatan, akan dapat diminimalisir. Maka diturunkanlah hipotesis 6_a:

H_{6a} : Efektivitas sistem pengendalian internal memediasi pengaruh positif kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan

- b. Pengaruh Pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan yang dimediasi oleh efektivitas sistem pengendalian internal

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi membutuhkan adanya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal sebagai variabel perantara untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan laporan keuangan perlu dikontrol oleh suatu sistem pengendali agar terhindar dari kecurangan yang dapat dengan mudah dilakukan melalui teknologi informasi.

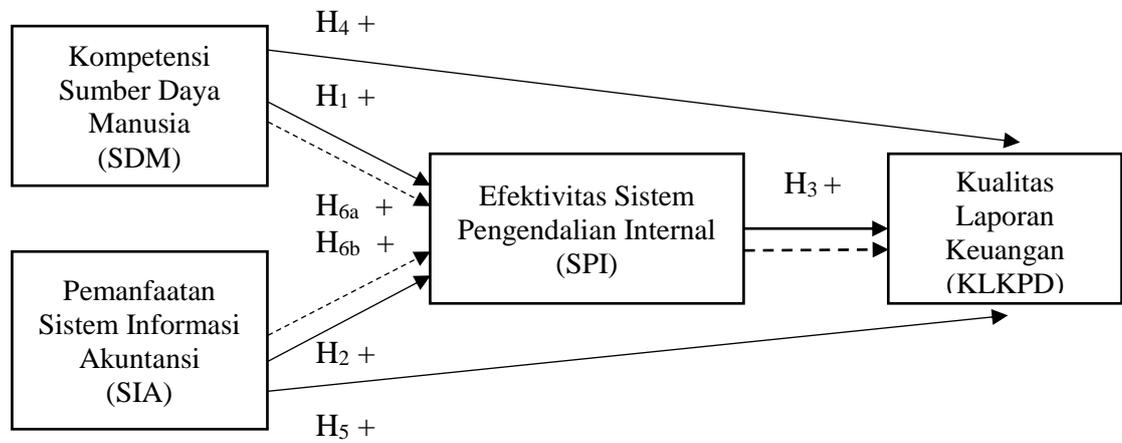
Perlu suatu sistem sebagai pengendali atas kemungkinan terjadinya kecurangan yang dapat dilakukan oleh aparat dalam pemanfaatan sistem informasi akuntansi agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kuat atau lemahnya sistem pengendalian internal yang dimiliki akan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang disajikan. Laporan keuangan yang

memiliki nilai informasi yang berkualitas, tidak terlepas dari penerapan sistem pengendalian internal yang efektif. Melalui penguatan sistem pengendalian internal, diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan melalui sistem informasi akuntansi dalam penyajian laporan keuangan (Evicahyani & Setiawina, 2015).

Penelitian Evicahyani dan Setiawina (2015) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal dapat memediasi hubungan antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Peneliti menduga bahwa dengan adanya pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang optimal dengan efektivitas penerapan sistem pengendalian internal maka kesalahan dan kecurangan akan dapat diminimalisir. Maka diturunkanlah hipotesis 6_b:

H_{6b} : Efektivitas sistem pengendalian internal memediasi pengaruh positif pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan

C. Model Penelitian



Gambar 2. 1

Model Penelitian